



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 019 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN**

**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran Pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda kendaraan nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Kendaraan Nomor Polisi Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan Bermotor.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus;

6. Kendaraan ...

6. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran;
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian kedua  
Maksud dan Tujuan  
- Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II  
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS  
Pasal 4

- (1) Tanda Nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
  - a. kendaraan perorangan dinas; dan
  - b. kendaraan dinas operasional.
- (2) Tanda Nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda Nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), Nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf P dan PZ) dan berbentuk plat aluminium berwarna-warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih;
- (3) Apa bila kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) diganti, maka tetap menggunakan Nomor polisi kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (4) Urutan pemberian tanda Nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan pemberian tanda Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dilaksanakan oleh DPKAD.

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah melalui Anggaran DPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda Nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan perubahan Nomor polisi kendaraan dinas jabatannya kepada bupati melalui kepala DPKAD.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pelaksanaan pemberian tanda Nomor polisi kendaraan dilaksanakan paling lama 1 (satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 24 MEI 2016

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada Tanggal 24 MEI 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**ROBBY KURNIAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2016 NOMOR 020**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 2016

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi

Pada Tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**ROBBY KURNIAWAN**

**NIP. 197906291998021002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : /KPTS/DISHUBKOMINFO/2016  
 TANGGAL : 2016  
 TENTANG : TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DIJINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NAMA INSTANSI		JABATAN		NOMOR POLISI
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		1	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 1 P
DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		2	WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 1 P
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		3	KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 2 P
PENGADILAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 3 P
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		5	KETUA PENGADILAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 4 P
		6	SEKRETARIS DAERAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 5 P
DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		7	WAKIL Ketua DPRD KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 6 PZ
PENGADILAN AGAMA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		8	WAKIL Ketua DPRD KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 7 PZ
		9	WAKIL Ketua DPRD KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 8 PZ
		1	KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 9 PZ
		1	ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA	BG 10 PZ
		2	ASISTEN PERKORANG DAN SPK	BG 11 PZ
		3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	BG 12 PZ
		4	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLTIK	BG 13 PZ
		5	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	BG 14 PZ
		6	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN	BG 15 PZ
		7	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	BG 16 PZ
		8	STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN	BG 17 PZ
		1	SEKRETARIS	BG 18 PZ
		2	KEPALA BAGIAN UMUM	BG 19 PZ
		3	KEPALA BAGIAN RAPAT, RISALAH DAN PRODUK HUKUM	BG 191 PZ
		4	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	BG 192 PZ
		1	INSPEKTUR	BG 193 PZ
		2	SEKRETARIS	BG 20 PZ
		3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	BG 201 PZ
		4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	BG 202 PZ
		5	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	BG 203 PZ
				BG 204 PZ

1. SEKRETARIAT DEWAN

2. INSPEKTORAT

NAMA INTANSI		JABATAN	NOMOR POLISI
1. BAPPEDA	1	KEPALA BADAN	BG 21 PZ
	2	SEKRETARIS	BG 211 PZ
	3	KEPALA BID. PENYUSUNAN PROGRAM, PELAIHAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	BG 212 PZ
	4	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	BG 213 PZ
	5	KEPALA BIDANG FISIK SARANA DAN PRASARANA	BG 214 PZ
	6	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	BG 215 PZ
BKD	1	KEPALA BADAN	BG 22 PZ
	2	SEKRETARIS	BG 221 PZ
	3	KEPALA BIDANG FORMASI PEGAWAI	BG 222 PZ
	4	KEPALA BIDANG MUTASI PEGAWAI	BG 223 PZ
	5	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BG 224 PZ
	6	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BG 225 PZ
5. BKBP	1	KEPALA BADAN	BG 23 PZ
	2	SEKRETARIS	BG 231 PZ
	3	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BG 232 PZ
	4	KEPALA BIDANG KELUARAGA BERENCANA	BG 233 PZ
	5	KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI	BG 234 PZ
	6	KEPALA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA	BG 235 PZ
6. BPMPPD	1	KEPALA BADAN	BG 24 PZ
	2	SEKRETARIS	BG 241 PZ
	3	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI	BG 242 PZ
	4	KEPALA BIDANG OTONOMI PENDAPATAN DESA	BG 243 PZ
	5	KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	BG 244 PZ
	6	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN ADMINISTRASI DESA	BG 245 PZ
7. BADAN KESBANG POL	1	KEPALA BADAN	BG 25 PZ
	2	SEKRETARIS	BG 251 PZ
	3	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA	BG 252 PZ
	4	KEPALA BIDANG FASILITAS ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN KEMASYARAKATAN	BG 253 PZ
	5	KEPALA BIDANG PARTISIPASI POLITIK	BG 254 PZ

NAMA INTANSI	JABATAN	NOMOR	POLISI
8. BP4K	1 KEPALA BADAN	BG 26 PZ	BG 261 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 262 PZ
	3 KEPALA BIDANG PERENCANAAN PROGRAM DAN LAPORAN		BG 263 PZ
	4 KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENYULUHAN		BG 264 PZ
	5 KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYULUHAN	BG 27 PZ	
9. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	1 KEPALA BADAN	BG 28 PZ	BG 281 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 282 PZ
	3 KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		BG 283 PZ
	4 KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		BG 284 PZ
	5 KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	BG 29 PZ	
10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 KEPALA DINAS	BG 29 PZ	BG 291 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 292 PZ
	3 KEPALA BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH		BG 293 PZ
	4 KEPALA BIDANG PERIMBANGAN		BG 294 PZ
	5 KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN BELANJA		BG 295 PZ
11. DPPKAD	6 KEPALA BIDANG AKUTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN		BG 296 PZ
	7 KEPALA BIDANG ASEPT	BG 30 PZ	
	1 KEPALA DINAS		BG 301 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 302 PZ
	3 KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		BG 303 PZ
	4 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN		BG 304 PZ
	5 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN		BG 305 PZ
12. DINAS KESEHATAN	6 KEPALA BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN		BG 311 PZ
	1 KEPALA DINAS	BG 31 PZ	
	2 SEKRETARIS		BG 312 PZ
	3 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		BG 313 PZ
	4 KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA		BG 314 PZ
	5 KEPALA BIDANG TEKNIS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEGIATAN		BG 315 PZ
13. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6 KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN		BG 315 PZ

NAMA INTANSI	JABATAN	NOMOR	POLISI
14. DINAS SOSIAL	1 KEPALA DINAS	BG 32 PZ	BG 321 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 322 PZ
	3 KEPALA BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		BG 323 PZ
	4 KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		BG 324 PZ
	5 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		BG 324 PZ
15. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 KEPALA DINAS	BG 33 PZ	BG 331 PZ
	2 SEKREATRIS		BG 332 PZ
	3 KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		BG 333 PZ
	4 KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN		BG 334 PZ
	5 KEPALA BIDANG TRANSMIGRAN		BG 334 PZ
16. DINAS PERTANIAN, PERTERNAKAN DAN PERIKANAN	1 KEPALA DINAS	BG 34 PZ	BG 341 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 342 PZ
	3 KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA		BG 343 PZ
	4 KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA		BG 344 PZ
	5 KEPALA BIDANG PETERNAKAN		BG 345 PZ
	6 KEPALA BIDANG PERIKANAN		BG 345 PZ
17. DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	1 KEPALA DINAS	BG 35 PZ	BG 351 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 352 PZ
	3 KEPALA BIDANG PRODUKSI PERKEBUNAN		BG 353 PZ
	4 KEPALA BIDANG USAHA PERKEBUNAN		BG 354 PZ
	5 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL		BG 355 PZ
	6 KEPALA BIDANG PERNATAGUNAAAN HUTAN		BG 356 PZ
	7 KEPALA BIDANG PELESTARIAN HUTAN		BG 357 PZ
	8 KEPALA BIDANG USAHA DAN PENDAPATAN KEHUTANAN		BG 357 PZ
18. DINAS KEPEND. DAN PENCATATAN SIPIL	1 KEPALA DINAS	BG 36 PZ	BG 361 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 362 PZ
	3 KEPALA BID. PENDAFTARAN PENDUDUK		BG 363 PZ
	4 KEPALA BID. PENCATATAN SIPIL		BG 364 PZ
	5 KEPALA BID. INFORMASI DATA DAN PELAYANAN		BG 364 PZ
19. DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	1 KEPALA DINAS	BG 37 PZ	BG 371 PZ
	2 SEKRETARIS		BG 372 PZ
	3 KEPALA BID. ENERGI		BG 373 PZ
	4 KEPALA BID. PERTAMBANGAN		BG 374 PZ
	5 KEPALA BID. GEOLOGI		BG 375 PZ
	6 KEPALA BID. LINGKUNGAN HIDUP		BG 375 PZ

NAMA INSTANSI		JABATAN		NOMOR POLISI	
20. DINAS PU BINA MARGA	1	KEPALA DINAS	BG 38 PZ	BG 381 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 382 PZ	
	3	KEPALA BID. PROGRAM		BG 383 PZ	
	4	KEPALA BID. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		BG 384 PZ	
	5	KEPALA BID. PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN			
	6	KEPALA BID. PEMBINAAN TEKNIK DAN PERALATAN			
21. DINAS PU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN	1	KEPALA DINAS	BG 39 PZ	BG 391 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 392 PZ	
	3	KEPALA BID. PROGRAM		BG 393 PZ	
	4	KEPALA BID. BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		BG 394 PZ	
	5	KEPALA BID. PENGAIRAN		BG 395 PZ	
	6	KEPALA BID. PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN			
22. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	1	KEPALA DINAS	BG 40 PZ	BG 401 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 402 PZ	
	3	KEPALA BID. PARWISATA		BG 403 PZ	
	4	KEPALA BID. KEPEMUDAAN		BG 404 PZ	
	5	KEPALA BID. KEOLAHRAGAAN			
23. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	KEPALA DINAS	BG 41 PZ	BG 411 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 412 PZ	
	3	KEPALA BID. ANGKUTAN		BG 413 PZ	
	4	KEPALA BID. PENGENDALIAN OPERASIONAL		BG 414 PZ	
	5	KEPALA BID. TEKNIK SAPRAS KESELAMATAN LALU LINTAS		BG 415 PZ	
	6	KEPALA BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
24. DINAS KOPERASI UKM	1	KEPALA DINAS	BG 42 PZ	BG 421 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 422 PZ	
	3	KEPALA BID. FASILITAS PEMBIAYAAN		BG 423 PZ	
	4	KEPALA BID. KOPERASI		BG 424 PZ	
	5	KEPALA BID. BINA USAHA, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	KEPALA DINAS	BG 43 PZ	BG 431 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 432 PZ	
	3	KEPALA BID. PERINDUSTRIAN		BG 433 PZ	
	4	KEPALA BID. PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR		BG 434 PZ	
	5	KEPALA BID. PERLINDUNGAN KONSUMEN			

NAMA INSTANSI	JABATAN	NOMOR POLISI
26. SATUAN POL PP DAN LINMAS  DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 KEPALA SATUAN	BG 44 PZ
	1 KETUA BADAN KEHORMATAN	BG 45 PZ
	2 KETUA KOMISI I	BG 46 PZ
	3 KETUA KOMISI II	BG 47 PZ
	4 KETUA KOMISI III	BG 48 PZ
	5 KETUA BADAN ANGGARAN	BG 49 PZ
	6 KETUA BADAN MUSYAWARAH	BG 50 PZ
	7 KETUA BADAN LEGISLASI	BG 51 PZ
	1 KEPALA KANTOR	BG 52 PZ
	1 KEPALA KANTOR	BG 53 PZ
	1 KEPALA KANTOR	BG 54 PZ
27. KANTOR KETAHANAN PANGAN	1 KEPALA KANTOR	BG 55 PZ
	1 KEPALA KANTOR	BG 56 PZ
28. KANTOR PERPUSTAKAAN	1 KEPALA KANTOR	BG 57 PZ
	1 KEPALA KANTOR	BG 58 PZ
29. RSUD TALANG UBI	1 DIREKTUR	BG 59 PZ
	1 KETUA KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 60 PZ
KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	2 SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 61 PZ
	1 KEPALA KANTOR BPN KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 62 PZ
3PN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 KEPALA KANTOR BPS KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 63 PZ
	1 SEKRETARIS	BG 64 PZ
3IRO PUSAT STATISTIK 30. SEKRETARIAT KORPRI	1 KEPALA BAGIAN PEMERINTAH UMUM	BG 65 PZ
	2 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BG 66 PZ
	3 KEPALA BAGIAN HUKUM	BG 67 PZ
	4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI	BG 68 PZ
	5 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	BG 69 PZ
	6 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN	BG 70 PZ
	7 KEPALA BAGIAN UMUM	BG 71 PZ
	8 KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	BG 72 PZ
	9 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	BG 73 PZ
	10 KEPALA BAGIAN HUMAS	BG 74 PZ
	11 KEPALA BAGIAN PROTOKOL	BG 75 PZ
DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SEKRETARIAT	1 CAMAT TALANG UBI	BG 71 PZ
	2 CAMAT PENUKAL	BG 72 PZ
	3 CAMAT ABAB	BG 73 PZ
	4 CAMAT TANAH ABANG	BG 74 PZ
	5 CAMAT PENUKAL UTARA	BG 75 PZ
KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		

NAMA INSTANSI	JABATAN	NOMOR POLISI
CADANGAN		BG 76 PZ
CADANGAN		BG 77 PZ
CADANGAN		BG 78 PZ
CADANGAN		BG 79 PZ
CADANGAN		BG 80 PZ

**BUPATI**

**PENUKAL ABAB LEMATANG LIR**

**H. HERI AMALINDO**